

**PERBUDAKAN MODERN DAN KEAMANAN MANUSIA: TATA KELOLA  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PENANGKAP IKAN INDONESIA DI KAPAL  
ASING**

**Zia'ulhaq As Shidqi  
20/466864/PSP/07009**

**Abstrak**

Isu *modern slavery* atau perbudakan modern yang menimpa pekerja migran penangkap ikan Indonesia di kapal asing sudah terjadi berkali-kali dan mengancam keamanan manusia. Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan negara bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi warga negaranya dimana pun berada termasuk pekerja migran penangkap ikan Indonesia di kapal asing yang berada di lautan dan di luar yurisdiksi nasional. Dengan menggunakan konsep *human security* dan rezim internasional, tesis ini berfokus pada pertanyaan mengapa pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan Penangkapan Ikan sebagai bentuk perlindungan warga negara, terutama para penangkap ikan yang bekerja lintas-negara. Studi ini menunjukkan bahwa reformasi sektor perikanan Indonesia harus segera dilakukan terkhusus pada isu perlindungan bagi pekerja penangkap ikan. Selain itu, koordinasi dan kerja sama semua pihak baik Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil diperlukan agar tujuan utama memberi perlindungan dan penghidupan yang layak dan adil dapat terealisasi.

**Kata Kunci:** Perbudakan modern, Perlindungan, Pekerja Migran Penangkap Ikan, Konvensi ILO C188

**MODERN SLAVERY AND HUMAN SECURITY: GOVERNANCE FOR THE  
PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT FISHING WORKERS  
ON FOREIGN SHIP**

**Zia'ulhaq As Shidqi  
20/466864/PSP/07009**

***Abstract***

*The issue of modern slavery that befell Indonesian migrant fishing workers on foreign ships has occurred many times and threatens human security. The government as the holder of state sovereignty is responsible for providing protection for its citizens wherever they are, including Indonesian migrant fishing workers on foreign vessels at sea and outside national jurisdiction. By using the concepts of human security and international regimes, this thesis focuses on the question why the Indonesian government has not ratified the ILO Convention No. 188 of 2007 Work in Fishing as a form of protection for citizens, especially fishermen working across borders. This study shows that Indonesia's fisheries sector reform must be carried out immediately, especially on the issue of protection for fishing workers. In addition, coordination and cooperation of all parties, both Ministries/Agencies and civil society, is needed so that the main goal of providing protection and a decent and just life can be realized.*

**Keywords:** Perbudakan modern, Protection, Migrant Fishing Workers, ILO Convention C188